

# **LAPORAN HASIL PENGAWALAN**

**SPI Kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera  
#BEKERJA pada Balai Besar Veteriner Wates  
DI Yogyakarta TA 2019**

**SATKER : BB Veteriner Wates  
LOKASI : Prov. DI Yogyakarta  
BULAN : April 2019**

**NOMOR : R.082/PW.180/G.5/05/2019  
TANGGAL : 20 Mei 2019**



# KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL

Jl. Harsono RM No. 3 Pasar Minggu Jakarta 12550  
Gedung B Lantai 2 Kantor Pusat Kementerian Pertanian  
Telepon : 7800230, 7806131 – 34 Pesawat : 3204, 3206, 3214, 3216 Fax : 7800220, 7804856  
Website : <http://www.deptan.go.id/itjen/>

Nomor : R-210/PW.180/G/06/2019 10 Juni 2019  
Sifat : Rahasia  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Pengantar Masalah Hasil Pengawasan  
Kegiatan BEKERJA Tahun 2019 pada Satker  
Balai Besar Veteriner Wates Provinsi Daerah  
Istimewa Yogyakarta

Yth. Kepala Balai Besar Veteriner Wates  
di  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Sesuai Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Jenderal No. 2019.5.103, kami telah melakukan pengawasan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Kegiatan BEKERJA Tahun 2019 pada Satker Balai Balai Besar Veteriner Wates yang dilaksanakan dari tanggal 10 April 2019 sampai dengan 16 April 2019 dengan hasil pengawasan sebagai berikut:

1. Dari 5 unsur SPIP, Balai Besar Veteriner Wates telah membangun 4 unsur, yaitu Evaluasi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian berupa pelaksanaan aktivitas pengendalian risiko berupa *Standar Operational Procedures* (SOP) serta informasi dan komunikasi, sedangkan unsur pemantauan pengendalian intern belum dibangun.
2. Sampai dengan akhir pengawasan, satker belum melakukan pemantauan dan evaluasi aktivitas pengendalian risiko sesuai dengan rancang kendali risiko yang telah ditetapkan.

Terhadap permasalahan tersebut, kami rekomendasikan kepada Kepala Balai Besar Veteriner Wates sebagai berikut:

1. Melakukan pembangunan/pengembangan SPI kegiatan pokok lainnya sesuai dengan tahapan pengembangan SPIP.
2. Melaksanakan aktivitas pengendalian sesuai dengan yang telah dirumuskan dalam register risiko dan waktu yang telah ditetapkan.

3. Melaksanakan internalisasi kebijakan dan SOP kepada seluruh pegawai terkait pelaksanaan kegiatan BEKERJA Tahun 2019.
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap aktivitas pengendalian risiko yang telah ditetapkan secara periodik sehingga dapat meminimalisir risiko pencapaian target kegiatan BEKERJA Tahun 2019.
5. Menyusun laporan pelaksanaan SPIP Kegiatan BEKERJA Tahun 2019 pada akhir tahun anggaran yang disertai dengan *eviden*/bukti pendukung.

Uraian lengkap mengenai hasil pengawalan tersebut kami tuangkan dalam laporan lengkap Nomor :R-082/PW.180/G.5/05/2019 tanggal 20 Mei 2019 (terlampir).

Kami berharap Saudara menindaklanjuti hasil pengawalan tersebut demi efektivitas pencapaian tujuan kegiatan BEKERJA Tahun 2019.

Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

  
**Inspektur Jenderal**  
**Justan R. Siahaan**  
**NIP. 19600220 198203 1 001**

Tembusan  
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Jakarta

**LAPORAN HASIL PENGAWALAN (PENGEMBANGAN SPIP)  
KEGIATAN BEKERJA  
SATKER BALAI BESAR VETERINER WATES  
TAHUN 2019**



**NOMOR: R- 082/PW.180/G.5/05/2019  
TANGGAL: 20 Mei 2019**



# KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL INSPEKTORAT IV

Jl. Harsono RM No. 3 Pasar Minggu Jakarta 12550  
Gedung B Lantai 3 Kantor Pusat Kementerian Pertanian Telepon / Fax. 021 - 78831857  
Website : <http://www.deptan.go.id/itjen/>

**Nomor** : R- 082/PW.180/G.5/05/2019 **20 Mei 2019**  
**Sifat** : Biasa  
**Lampiran** : Satu Berkas  
**Hal** : Hasil Pengawasan Kegiatan BEKERJA  
Tahun 2019 pada Satker Balai Besar  
Veteriner Wates Provinsi DI Yogyakarta

Kami telah melakukan pengawasan (Pembinaan Sistem Pengendalian Intern) pada Kegiatan BEKERJA Tahun 2019 pada Satker Balai Besar Veteriner (BBVet) Wates Tahun Anggaran 2019, dengan pokok-pokok hasil pengawasan sebagai berikut:

**BAGIAN PERTAMA** : **SIMPULAN DAN REKOMENDASI**  
**BAGIAN KEDUA** : **URAIAN HASIL PENGAWALAN**

## **BAGIAN PERTAMA SIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **A. SIMPULAN**

Simpulan hasil pengawalan (Pembinaan Sistem Pengendalian Intern) Kegiatan BEKERJA Tahun 2019 pada Satker Balai Besar Veteriner Wates sebagai berikut.

1. Sub unsur Lingkungan Pengendalian yang berpengaruh terhadap risiko Kegiatan BEKERJA Tahun 2019 pada Satker Balai Besar Veteriner Wates, yaitu (a) Komitmen Terhadap Kompetensi; (b) Kepemimpinan yang kondusif; (c) Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan; (d) Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat; (e) Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM; dan (f) Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait.
2. Penilaian risiko Kegiatan BEKERJA Tahun 2019 menghasilkan 17 (tujuh belas) risiko sebagaimana tertuang dalam register risiko pada Lampiran 1.
3. Seluruh risiko yang dinilai telah dirumuskan kegiatan pengendalian risiko berupa 15 (lima belas) *Standart Operational Procedures/SOP* sub kegiatan pada Kegiatan BEKERJA Tahun 2019 (Lampiran 2).
4. Untuk mengukur pelaksanaan SOP sebagai kegiatan pengendalian risiko, BBVet Wates telah membangun informasi dan komunikasi berupa penyusunan dokumen proses verbal yang ditandai dengan memberi nama dan paraf para pelaksana untuk setiap langkah kerja SOP (Lampiran 2) namun belum menyelenggarakan sosialisasi pada jajaran manajemen balai.
5. Sampai dengan akhir pengawalan, satker belum melakukan pemantauan dan evaluasi aktivitas pengendalian risiko sesuai dengan rancang kendali risiko yang telah ditetapkan.

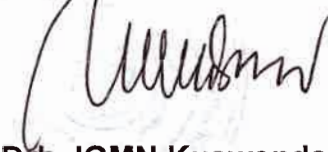
### **B. REKOMENDASI**

Terhadap permasalahan tersebut kami rekomendasikan kepada Kepala BBVet Wates selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk:

1. Melakukan pembangunan/pengembangan SPI kegiatan pokok lainnya sesuai dengan tahapan pengembangan SPIP.
2. Melaksanakan aktivitas pengendalian sesuai dengan rumusan dalam register risiko dan waktu yang telah ditetapkan.

3. Melaksanakan internalisasi kebijakan dan SOP kepada seluruh pegawai terkait pelaksanaan kegiatan BEKERJA Tahun 2019.
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap aktivitas pengendalian risiko yang telah ditetapkan secara periodik sehingga dapat meminimalisir risiko pencapaian target kegiatan BEKERJA Tahun 2019.
5. Menyusun laporan pelaksanaan SPIP Kegiatan BEKERJA Tahun 2019 pada akhir tahun anggaran yang disertai dengan *eviden*/bukti pendukung.

**Inspektur IV**



**Drh. IGMN Kuswandana, MM**  
**NIP. 19660408 199403 1 001**

## BAGIAN KEDUA URAIAN HASIL PENGAWALAN

### BAB I INFORMASI UMUM

#### A. INFORMASI PENGAWALAN

##### 1. Dasar Pengawalan

- a. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Nomor 2019.5.103 Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian TA. 2018.
- b. Surat Keputusan Inspektur Jenderal No. B.1146/Kpts/PW.180/G/05/2017 Tentang Standar Teknis Penugasan Pengawalan Pokok Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pertanian.
- c. Surat Tugas Inspektur IV Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian No. B.0111/PW.180/G.5/04/2019 tanggal 8 April 2019.

##### 2. Tujuan Pengawalan

Pengawalan Kegiatan BEKERJA Tahun 2019 bertujuan untuk memastikan Balai Besar Veteriner Wates telah membangun dan mengimplementasikan SPIP, khususnya (1) melakukan penilaian risiko, (2) membangun Kegiatan Pengendalian (SOP Pengendalian) untuk menangani risiko, (3) mengukur pelaksanaan SOP, dan/atau (4) mengevaluasi atau membuat rencana evaluasi pelaksanaan SOP.

##### 3. Manfaat Pengawalan

Dengan pengawalan Kegiatan BEKERJA Tahun 2019 diharapkan BBVet Wates dapat mengidentifikasi secara dini hambatan atau penyimpangan pencapaian tujuan kegiatan dan menanganinya secara lebih efisien.

##### 4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan pengawalan adalah pada kegiatan BEKERJA Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh BBVet Wates yang memiliki daya ungkit tinggi pencapaian tugas dan fungsi balai.

##### 5. Metodologi Pengawalan

Pengawalan dilakukan dengan metode *Focus Group Discussion* (FGD). Tim menyiapkan bahan FGD terkait dengan kegiatan yang akan dikawal pembangunan SPIP. Bahan yang disiapkan terdiri dari *mapping* (reviu terbatas) penyelenggaraan SPIP kegiatan strategis di unit kerja yang akan dikawal



berupa pengukuran Indeks Persepsi SPIP. Selanjutnya melaksanakan pemaparan dan diskusi terhadap 5 unsur SPI sampai ke pengembangan SPIP yang lengkap.

6. Waktu Pengawasan

Pengawasan dilakukan mulai dari tanggal 10 April 2019 sampai dengan 16 April 2019.

**B. Data Umum Unit Kerja**

1. Nama Unit Kerja : Balai Besar Veteriner Wates
2. Pimpinan Unit Kerja : drh. Bagoes Poermadjaja, M.Sc
3. Alamat : Jln. Raya Jogja Wates Km. 27 Daerah Istimewa Yogyakarta
4. Kuasa Pengguna Anggaran : drh. Bagoes Poermadjaja, M.Sc
5. Kasi Pelayanan Veterines : drh. Indarto Sudarsono, MMT selaku Ketua Satlak PI
6. Pj. Kegiatan BEKERJA : drh. Didik Yulianto, M.Sc

## BAB II URAIAN HASIL PENGAWALAN

### A. Informasi Kegiatan Pokok.

Berdasarkan Permentan Nomor: 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Program BEKERJA, maka dilakukan pengawalan pembinaan SPI kegiatan pokok Balai Besar Veteriner (BBVet) Wates yaitu Kegiatan BEKERJA Tahun 2019.

### B. Hasil Pengawalan

Tim pengawalan telah melaksanakan pembinaan Sistem Pengendalian Intern pada Satker BBVet Wates Tahun 2019 dengan hasil sebagai berikut:

#### 1. Kondisi Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan hasil evaluasi lingkungan pengendalian pada Balai Besar Veteriner (BBVet) Wates Tahun 2019 melalui kuesioner, diantaranya unsur Lingkungan Pengendalian yang berpengaruh terhadap risiko Kegiatan BEKERJA sebagai berikut.

- a. Komitmen terhadap Kompetensi yakni standar kompetensi dikembangkan terus menerus sesuai perubahan yang terjadi, dan ada sarana pemantauan secara otomatis oleh pimpinan organisasi atas kesesuaian penempatan pejabat dengan standar kompetensi.
- b. Kepemimpinan yang kondusif yakni pimpinan organisasi/unit-organisasi/unit kerja belum sepenuhnya mengevaluasi kebijakan/prosedur dan implementasinya secara berkala dan terdokumentasi, selain itu kebijakan/prosedur belum dikembangkan terus menerus sesuai dengan perubahan yang terjadi serta belum dilakukan pemantauan secara otomatis/online oleh pimpinan organisasi.
- c. Struktur Organisasi sesuai kebutuhan yakni Unit Organisasi telah merancang sistem pelaporan yang mampu memfasilitasi unit organisasi dalam Unit Organisasi dalam melaksanakan dan melaporkan kewenangan dan tanggung jawabnya dan Unit Organisasi telah melaksanakan evaluasi dan mengusulkan penyesuaian secara periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis.

- d. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat yakni prosedur pendelegasian wewenang belum sepenuhnya disesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis yang terjadi, dan atas pelaksanaan pendelegasian wewenang belum dilakukan pemantauan otomatis/online oleh pimpinan organisasi/unit organisasi.
- e. Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM yakni kebijakan/aturan pembinaan SDM dan pelaksanaan rekrutmen, pembinaan pegawai sampai dengan pemberhentiannya belum sepenuhnya dikembangkan sesuai dengan perubahan lingkungan strategis yang terjadi, dan belum dilakukan pemantauan otomatis/online oleh pimpinan.
- f. Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait yakni pimpinan di setiap jenjang level unit kerja belum sepenuhnya melakukan evaluasi terhadap pemberlakuan kebijakan/prosedur mekanisme saling uji data dengan unit organisasi/ unit kerja lain secara berkala dan terdokumentasi, selain itu mekanisme saling uji data belum dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan telah dilakukan pemantauan secara otomatis/online oleh pimpinan organisasi.

## 2. Penilaian Risiko

### a. Definisi Kegiatan BEKERJA Tahun 2019.

Balai Besar Veteriner Wates telah merumuskan atau menyepakati definisi pelaksanaan Kegiatan BEKERJA Tahun 2019 adalah Kegiatan pemberian paket bantuan ternak unggas kepada Rumah Tangga Miskin/RTM dengan anggaran sebesar Rp62.108.424.000,00 melalui pengadaan bantuan kandang senilai Rp500.000,00/RTM, ternak ayam sebanyak 1.029.300 ekor, pakan ayam sebanyak 3.087.900 kg, obat-obatan 20.586 paket pada 20.586 RTM untuk meningkatkan konsumsi protein hewani dan peningkatan pendapatan rumah tangga miskin Kabupaten Blora sejumlah 9.953 RTM dan Kabupaten Kebumen sejumlah 9.369 RTM dan Kabupaten Klaten sejumlah 1.264 RTM yang dilaksanakan oleh BBVet Wates pada tahun 2019.

### b. Penyusunan Proses Bisnis

Berdasarkan hasil pengawalan dapat disimpulkan proses bisnis Kegiatan BEKERJA Tahun 2019, yaitu:

- a) Perencanaan Anggaran dan Kegiatan.
- b) Pengorganisasian Kegiatan.
- c) Koordinasi dan Sosialisasi Kegiatan.
- d) Verifikasi dan Penetapan Rumah Tangga Miskin Penerima Bantuan.
- e) Penyerahan Uang Tunai Untuk Pembuatan Kandang.
- f) Pengadaan Ternak, Pakan dan Obat.
- g) Pemanfaatan Bantuan Hibah.
- h) Pengelolaan Administrasi Hibah.
- i) Pelaporan

Proses bisnis yang disusun Penanggungjawab Kegiatan BEKERJA telah memenuhi prinsip *SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time Bound)*.

c. Identifikasi Risiko

Berdasarkan hasil identifikasi risiko diketahui bahwa terdapat 17 risiko dalam pelaksanaan kegiatan #Bekerja, yaitu:

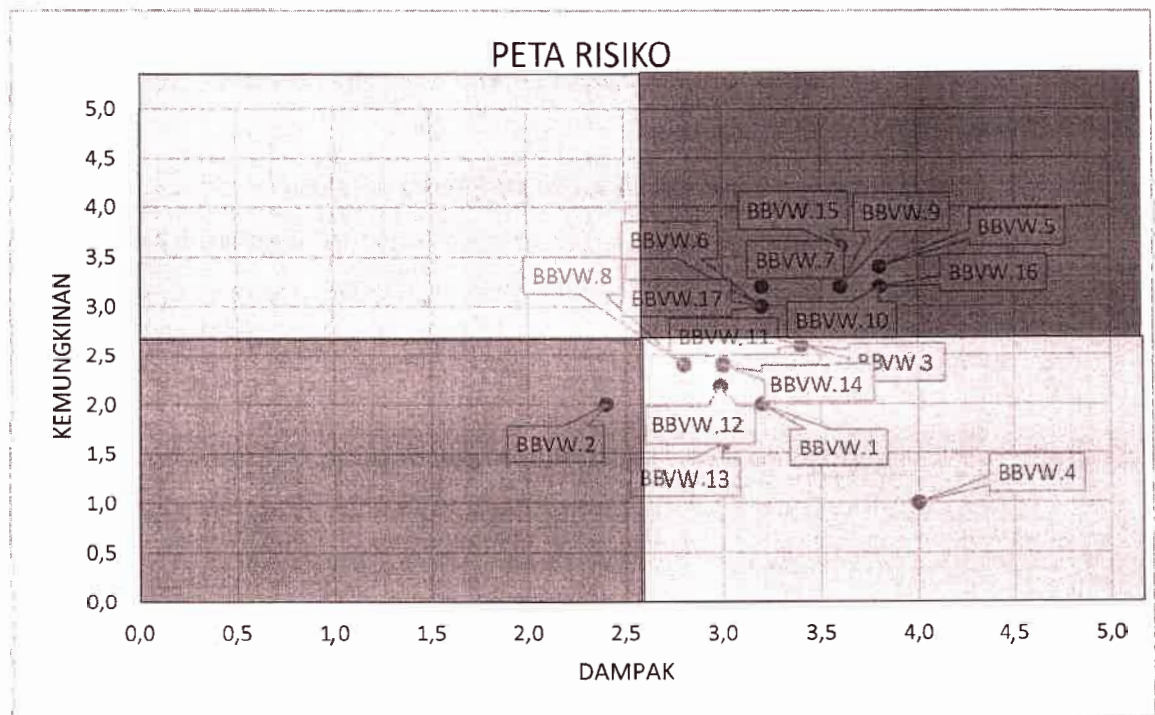
- a) Anggaran harga ayam yang terlalu rendah.
- b) Kelebihan anggaran pengadaan ayam.
- c) Hubungan tata kerja dan koordinasi dengan instansi terkait tidak dapat berjalan lancar dan optimal.
- d) Penolakan oleh instansi/aparat setempat
- e) RTM penerima bantuan tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam juknis.
- f) Keterlambatan pembuatan kandang.
- g) Pemotongan uang kandang oleh UPKK.
- h) Kemahalan harga.
- i) Barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi dan volume pada kontrak.
- j) Ternak yang disalurkan tidak terjamin kesehatannya.
- k) Ayam tidak mendapatkan pakan.
- l) Gagal tender.
- m) Penyelesaian pekerjaan melebihi waktu kontrak.
- n) Pihak ketiga wanprestasi namun jaminan pelaksanaan tidak dapat dicairkan.

- o) Ayam mati/hilang/dipotong/dijual oleh RTM sebelum masa produksi.
- p) Dokumen pendukung hibah tidak lengkap dan terlambat.
- q) Laporan kurang informatif terkait permasalahan seperti kondisi ternak yang mati serta hambatan lainnya di lapangan.

Adapun hasil identifikasi risiko berupa register risiko secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 1.

d. Analisis Risiko

Unit kerja dan tim pengawalan telah melakukan analisis risiko terhadap risiko yang telah diidentifikasi dengan hasil peta risiko sebagai berikut.



Berdasarkan peta diatas disimpulkan bahwa

- a) Terdapat 11 risiko yang berada pada kuadran I (Risiko Tinggi) yang harus segera di eliminasi atau dihilangkan,
  - b) Terdapat 5 risiko yang berada pada kuadran IV (Risiko Sedang)
  - c) Terdapat 1 risiko yang berada pada kuadran III (Risiko Rendah)
- e. Pengendalian Risiko.

Sampai dengan akhir pengawalan, Satker telah menyusun seluruh SOP yang telah diidentifikasi.

Adapun pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan pengendalian secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 2.

f. Informasi dan komunikasi.

Satker Balai Besar Veteriner Wates belum melakukan infokom dan pendampingan terhadap penyelenggaraan informasi dan komunikasi belum dapat dilakukan. Kegiatan informasi ini akan dilaksanakan oleh Satker Balai Besar Veteriner Wates pada bulan April/Mei2019.

g. Pemantauan Pelaksanaan Kebijakan/SOP.

Satker Balai Besar Veteriner Wates belum melakukan pemantauan dan pendampingan terhadap penyelenggaraan pemantauan belum dapat dilakukan.

Dalam rangka meningkatkan penerapan Sistem Pengendalian Intern Kegiatan BEKERJA Tahun 2019 pada Satker Balai Besar Veteriner Wates, kami rekomendasikan kepada Kepala BBVet Wates selaku KPA, agar:

1. Melakukan pembangunan/pengembangan SPI kegiatan pokok lainnya sesuai dengan tahapan pengembangan SPIP sebagaimana telah disampaikan dalam pengawalan.
2. Melaksanakan aktivitas pengendalian sesuai dengan yang telah dirumuskan dalam register risiko dan waktu yang telah ditetapkan.
3. Melaksanakan internalisasi kebijakan dan SOP kepada seluruh pegawai pelaksana kegiatan BEKERJA Tahun 2019.
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap aktivitas pengendalian risiko yang telah ditetapkan secara periodik sehingga dapat meminimalisir risiko pencapaian target kegiatan BEKERJA Tahun 2019.
5. Menyusun laporan pelaksanaan SPIP Kegiatan BEKERJA Tahun 2019 pada akhir tahun anggaran yang disertai dengan evident/bukti pendukung.

## Lampiran 1

(Definisi Kegiatan, Register Resiko, Analisis Resiko dan Rancang Kendali)

**PENDEFINISIAN DAN PROSES BISNIS KEGIATAN BEKERJA**

**BALAI BESAR VETERINER WATES**

**PROSES BISNIS KEGIATAN POKOK**

**Nama Kegiatan** : **Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (#Bekerja) Bidang Peternakan tahun 2019**

**Definisi Kegiatan** : Kegiatan pemberian paket bantuan ternak ayam, pakan, obat-obatan dan kandang kepada rumah Tangga miskin (RTM) sebanyak 20.586 KK dengan anggaran sebesar Rp 62.108.424.000.- melalui pengadaan ternak ayam sebanyak 1.029.300 ekor, pakan sebanyak 3.087.900 kg, obat-obatan sebanyak 20.586 paket dan bantuan pembuatan kandang sebanyak sejumlah Rp.500.000./RTM untuk 20.586 RTM untuk meningkatkan konsumsi protein hewani dan peningkatan pendapatan Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kabupaten Blora sejumlah 9.953 RTM dan Kabupaten Kebumen sejumlah 9.369 RTM dan Kabupaten Klaten sejumlah 1.264 RTM yang dilaksanakan oleh BBVet Wates pada tahun 2019.

No.	Tahapan/Proses Bisnis	Sub-Output	Penanggung Jawab
1	Perencanaan Anggaran dan Kegiatan	Dokumen anggaran (RKAKL, POK, ToR, RAB)	Kabid Program dan evaluasi
2	Pengorganisasian Kegiatan	SK Kepala BBVet Wates	Kabaq Umum
3	Verifikasi dan Penetapan Rumah Tangga Miskin Penerima Bantuan	Berita Acara Hasil Verifikasi dan SK Kepala Balai/PPK tentang Penetapan RTM.	Ketua Bekerja/Kabid Program dan Evaluasi
4	Penyerahan Uang Tunai Untuk Pembuatan Kandang	Bukti Transfer ke UPKK dan Bukti penyerahan dari UPKK ke RTM (BAST/Kuitansi)	Ketua Bekerja/Kabid Program dan Evaluasi
5	Pengadaan Ternak, Pakan dan Obat	Dokumen pengadaan, Kontrak dan BAST pengadaan paket bantuan	Ketua Bekerja/Kabid Program dan Evaluasi
6	Pemanfaatan Bantuan Hibah	Laporan perkembangan paket bantuan	Ketua Bekerja/Kabid Program dan Evaluasi
7	Pengelolaan Administrasi Hibah	Dokumen hibah	Ketua Bekerja/Kabid Program dan Evaluasi
8	Pelaporan	Laporan perkembangan kegiatan tingkat penerima, kabupaten dan provinsi per triwulan.	Ketua Bekerja/Kabid Program dan Evaluasi

**OUTPUT KEGIATAN**

Tersalurkannya paket bantuan ternak unggas, aneka ternak dan ruminansia kecil kepada Rumah Tangga Miskin/RTM tahun 2019 sebanyak 20.586 RTM terdiri dari Kabupaten Blora sejumlah 9.953 RTM, Kabupaten Kebumen sejumlah 9.369 RTM dan Kabupaten Klaten sejumlah 1.264 RTM.

Ketua Satlak PI

drh. Indarto Sudarsono, MMT  
NIP. 19640624 199303 1 016

Wates, 11 April 2019  
Mengetahui,  
Pih. Kepala Balai

drh. Indarto Sudarsono, MMT  
NIP. 19640624 199303 1 016



DAFTAR RISIKO

KEGIATAN : Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Bidang Peternakan Tahun 2019  
BALAI BESAR VETERINER WATES

Nomor	Proses Bisnis	Register Risiko	Pernyataan Risiko	Pemilik	Penyebab		Dampak	Pengendalian yang Telah Dilakukan	Sisa Risiko	
					Sumber	Uraian				
1	Perencanaan Anggaran dan Kegiatan	BBVW.1	Anggaran harga ayam yang terlalu rendah	KPA, PPK, Kabid Program dan Evaluasi	Proses perencanaan anggaran kurang cermat	C	Anggaran harga ayam yang terlalu rendah karena proses perencanaan anggaran yang kurang cermat	Kesulitan dalam penyusunan HPS	-	Anggaran harga ayam yang terlalu rendah
		BBVW.2	Kelebihan anggaran pengadaan ayam	KPA, PPK, Kabid Program dan Evaluasi	Perencanaan kegiatan yang ditetapkan Pusat belum valid (data RTM belum valid)	C	Kelebihan anggaran pengadaan ayam karena perencanaan kegiatan yang ditetapkan pusat belum valid (Data RTM belum valid)	Anggaran yang tidak termanfaatkan	-	Kelebihan anggaran pengadaan ayam
2	Pengorganisasian Kegiatan	BBVW.3	Hubungan tata kerja dan koordinasi dengan instansi terkait tidak dapat berjalan lancar dan optimal	KPA, Kabag Umum, PPK	Pendamping tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Dusun belum ditunjuk dan ditetapkan serta uraian tugas belum dicantumkan dalam SK Kepala Balai	C	Hubungan tata kerja dan koordinasi dengan instansi terkait tidak dapat berjalan lancar dan optimal karena Pendamping tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Dusun belum ditunjuk dan ditetapkan serta uraian tugas belum dicantumkan dalam SK Kepala Balai	Komunikasi dan koordinasi terhambat	-	Hubungan tata kerja dan koordinasi dengan instansi terkait tidak dapat berjalan lancar dan optimal
3	Verifikasi dan Penetapan Rumah Tangga Miskin Penerima Bantuan	BBVW.4	Penolakan oleh instansi/aparat setempat	KPA, PPK	Hasil verifikasi RTM tidak sesuai dengan harapan aparat setempat/konflik kepentingan	c	Penolakan oleh instansi/aparat setempat karena Hasil verifikasi RTM tidak sesuai dengan harapan aparat setempat/konflik kepentingan	Kegiatan Bekerja Gagal dilaksanakan	-	Penolakan oleh instansi/aparat setempat
		BBVW.5	RTM penerima bantuan tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam juknis	KPA, PPK, Tim Verifikasi	Verifikasi RTM dilakukan di Kantor Kecamatan (dihadiri Kadus, Kades, TKSK/perwakilan Dinsos Tingkat Kabupaten dan Petugas Dinas yang Membidangi Fungsi Peternakan, dan verifikasi faktual di tingkat lapangan tidak seluruhnya dilakukan serta belum ditetapkan oleh Kepala BBVet Wates selaku KPA	C	RTM penerima bantuan tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam juknis karena Verifikasi RTM dilakukan di Kantor Kecamatan (dihadiri Kadus, Kades, TKSK/perwakilan Dinsos Tingkat Kabupaten dan Petugas Dinas yang Membidangi Fungsi Peternakan, dan verifikasi faktual di tingkat lapangan tidak seluruhnya dilakukan serta belum ditetapkan oleh Kepala BBVet Wates selaku KPA	Bantuan tidak tepat sasaran	-	RTM penerima bantuan tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam juknis

Nomor	Proses Bisnis	Register Risiko	Pernyataan Risiko	Pemilik	Penyebab			Dampak	Pengendalian yang Telah Dilakukan	Sisa Risiko
					Sumber	UIC	Uraian			
4	Penyerahan Uang Tunai Untuk Pembuatan Kandang	BBVW.6	Keterlambatan pembuatan kandang	PPK	Kesalahan penyerahan nomor rekening oleh UPKK	C	Keterlambatan pembagian uang bantuan pembuatan kandang karena kesalahan penyerahan nomor rekening oleh UPKK	Keterlambatan penyaluran ayam	-	Keterlambatan pembuatan kandang
		BBVW.7	Pemotongan uang kandang oleh UPKK	PPK	Kurangnya sosialisasi terkait pemanfaatan uang kandang	C	Pemotongan uang kandang oleh UPKK karena Kurangnya sosialisasi terkait pemanfaatan uang kandang	Kerugian negara	-	Pemotongan uang kandang oleh UPKK
5	Pengadaan Ternak, Pakan dan Obat	BBVW.8	Kemahalan harga	PPK	Penyusunan HPS tidak sesuai ketentuan	C	Kemahalan harga karena Penyusunan HPS tidak sesuai ketentuan	kerugian negara	-	Kemahalan harga
		BBVW.9	Barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi dan volume pada kontrak	KPA, PPK	Pihak ke 3 kurang bertanggung jawab	C	Barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi dan volume pada kontrak karena Pihak ke 3 kurang bertanggung jawab	Kerugian negara	-	Barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi dan volume pada kontrak
		BBVW.10	Ternak yang disalurkan tidak terjamin kesehatannya	KPA, PPK dan Pokja Pemilihan	Pihak ke-3 tidak melampirkan surat keterangan keswan dan bukti vaksinasi	C	Ternak yang disalurkan tidak terjamin kesehatannya karena pihak ke-3 tidak melampirkan surat keterangan keswan dan bukti vaksinasi	Kematian ternak tinggi	-	Ternak yang disalurkan tidak terjamin kesehatannya
		BBVW.11	Ayam tidak mendapatkan pakan	KPA, PPK, Penyedia Paket Bantuan	Jadwal penyaluran ayam dan pembagian pakan dan obat-obatan belum diatur secara rinci	C	Penyaluran pakan tidak bersamaan dengan ayam karena Jadwal penyaluran ayam dan pembagian pakan belum diatur secara rinci	Penyaluran pakan dan obat-obatan tidak bersamaan dengan ayam	-	Ayam tidak mendapatkan pakan
		BBVW.12	Gagal tender	PPK	1. HPS terlalu rendah (tidak ada yang menawar), 2. Spesifikasi barang tidak ada dilapangan	C	Gagal tender karena 1. HPS terlalu rendah (tidak ada yang menawar), 2. Spesifikasi barang tidak ada dilapangan	waktu pelaksanaan kegiatan mundur	-	Gagal tender
		BBVW.13	Penyelesaian pekerjaan melebihi waktu kontrak	KPA, PPK, Penyedia Paket Bantuan	Pihak ke-3 kurang bertanggung jawab	C	Penyelesaian pekerjaan melebihi waktu kontrak karena Pihak ke-3 kurang bertanggung jawab	target pelaksanaan kegiatan terlambat	-	Penyelesaian pekerjaan melebihi waktu kontrak



Nomor	Proses Bisnis	Register Risiko	Pernyataan Risiko	Pemilik	Penyebab		Dampak	Pencegahan yang Telah Dilakukan	Sisa Risiko	
					Sumber	Uraian				
		BBVW.14	Pihak ke-3 wanprestasi namun jaminan pelaksanaan tidak dapat dicairkan	PPK	PPK tidak melakukan crosscheck terhadap validitas jaminan pelaksanaan pada instansi penerbit	C	Pihak ke-3 wanprestasi namun jaminan pelaksanaan tidak dapat dicairkan karena PPK tidak melakukan crosscheck terhadap validitas jaminan pelaksanaan pada instansi penerbit	Kerugian negara		Pihak ke-3 wanprestasi namun jaminan pelaksanaan tidak dapat dicairkan
6	Pemanfaatan Bantuan Hibah	BBVW.15	Ayam mati/hilang/dipotong/dijual oleh RTM sebelum masa produksi	KPA, PPK	Pendampingan yang dilakukan oleh Satker, Dinas yang membidangi fungsi peternakan di Provinsi/Kabupaten tidak optimal.	C	Ayam mati/hilang/dipotong/dijual oleh RTM sebelum masa produksi karena Pendampingan yang dilakukan oleh Satker, Dinas yang membidangi fungsi peternakan di Provinsi/Kabupaten tidak optimal.	Tujuan kegiatan untuk meningkatkan pendapatan RTM belum tercapai.		Ayam mati/hilang/dipotong/dijual oleh RTM sebelum masa produksi
7	Pengelolaan Administrasi Hibah	BBVW.16	Dokumen pendukung hibah tidak lengkap dan terlambat	KPA, Kabag Umum, Petugas SIMAK	Kurangnya koordinasi dengan Dinas Kabupaten setempat yang membidangi peternakan	C	Dokumen pendukung hibah tidak lengkap dan terlambat karena Kurangnya koordinasi dengan Dinas Kabupaten setempat yang membidangi peternakan	Penatausahaan hibah tidak tercapai, proses penghapusan hibah terlambat		Dokumen pendukung hibah tidak lengkap dan terlambat
8	Pelaporan	BBVW.17	Laporan kurang informatif terkait permasalahan seperti kondisi ternak yang mati serta hambatan lainnya di lapangan	KPA, PPK, Penanggung Jawab Kegiatan	belum disusun alur dan format pelaporan dari tingkat desa sampai ke BBVet Wates	C	Laporan kurang informatif terkait permasalahan seperti kondisi ternak yang mati serta hambatan lainnya di lapangan karena belum disusun alur dan format pelaporan dari tingkat desa sampai ke BBVet Wates	Perkembangan ayam tidak dapat diketahui dan tidak dapat dipantau secara optimal		Laporan kurang informatif terkait permasalahan seperti kondisi ternak yang mati serta hambatan lainnya di lapangan

Ketua Satlak PI

Wates, 11 April 2019  
Mengetahui,  
Plh Kepala Balai

drh. Indarto Sudarsono, MMT  
NIP. 19640624 199303 1 016

drh. Indarto Sudarsono, MMT  
NIP. 19640624 199303 1 016

## ANALISIS RISIKO

KEGIATAN : Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Bidang Peternakan Tahun

BALAI BESAR VETERINER WATES

REGISTER RISIKO	PERNYATAAN RISIKO	Ismi		Ika		Ari		Wawan		Laksmi		Rerata		Nilai Risiko	Peringkat
		D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	KxD	
BBVW.1	Anggaran harga ayam yang terlalu rendah	4	2	4	2	4	2	2	2	2	2	3,2	2,0	6,4	14
BBVW.2	Kelebihan anggaran pengadaan ayam	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2,4	2,0	4,8	16
BBVW.3	Hubungan tata kerja dan koordinasi dengan instansi terkait tidak dapat berjalan lancar dan optimal	4	4	3	2	4	3	3	2	3	2	3,4	2,6	8,8	9
BBVW.4	Penolakan oleh instansi/aparat setempat	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4,0	1,0	4,0	17
BBVW.5	RTM penerima bantuan tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam juknis	4	4	3	3	4	2	4	4	4	4	3,8	3,4	12,9	3
BBVW.6	Keterlambatan pembuatan kandang	4	3	2	3	4	3	3	3	3	3	3,2	3,0	9,6	7
BBVW.7	Pemotongan uang kandang oleh UPKK	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3,6	3,6	13,0	1
BBVW.8	Kemahalan harga	4	3	3	2	3	3	2	2	2	2	2,8	2,4	6,7	12
BBVW.9	Barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi dan volume pada kontrak	4	3	3	3	3	2	4	4	4	4	3,6	3,2	11,5	6
BBVW.10	Ternak yang disalurkan tidak terjamin kesehatannya	4	3	3	2	4	3	4	4	4	4	3,8	3,2	12,2	4
BBVW.11	Ayam tidak mendapatkan pakan	3	3	3	2	3	2	4	3	4	3	3,4	2,6	8,8	9
BBVW.12	Gagal tender	4	1	3	2	4	2	2	3	2	3	3,0	2,2	6,6	13

REGISTER RISIKO	PERNYATAAN RISIKO	ismi		ika		ari		wawan		Laksmi		Rerata		Nilai Risiko KxD	Peringkat
		D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K		
BBVW.13	Penyelesaian pekerjaan melebihi waktu kontrak	3	1	3	2	3	1	3	2	3	2	3,0	1,6	4,8	15
BBVW.14	Pihak ke-3 wanprestasi namun jaminan pelaksanaan tidak dapat dicairkan	3	2	3	2	3	2	3	3	3	3	3,0	2,4	7,2	11
BBVW.15	Ayam mati/hilang/dipotong/dijual oleh RTM sebelum masa produksi	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3,6	3,6	13,0	1
BBVW.16	Dokumen pendukung hibah tidak lengkap dan terlambat	4	4	3	3	4	3	4	3	4	3	3,8	3,2	12,2	4
BBVW.17	Laporan kurang informtif terkait permasalahan seperti kondisi ternak yang mati serta hambatan	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,2	3,0	9,6	7

**KETERANGAN :**

Kemungkinan (K)

1 =Jarang sekali

2 = Jarang

3 =Sering

4 =Sering Sekali

Dampak (D)

1 = kecil sekali

2 = kecil

3 = besar

4 = sangat besar

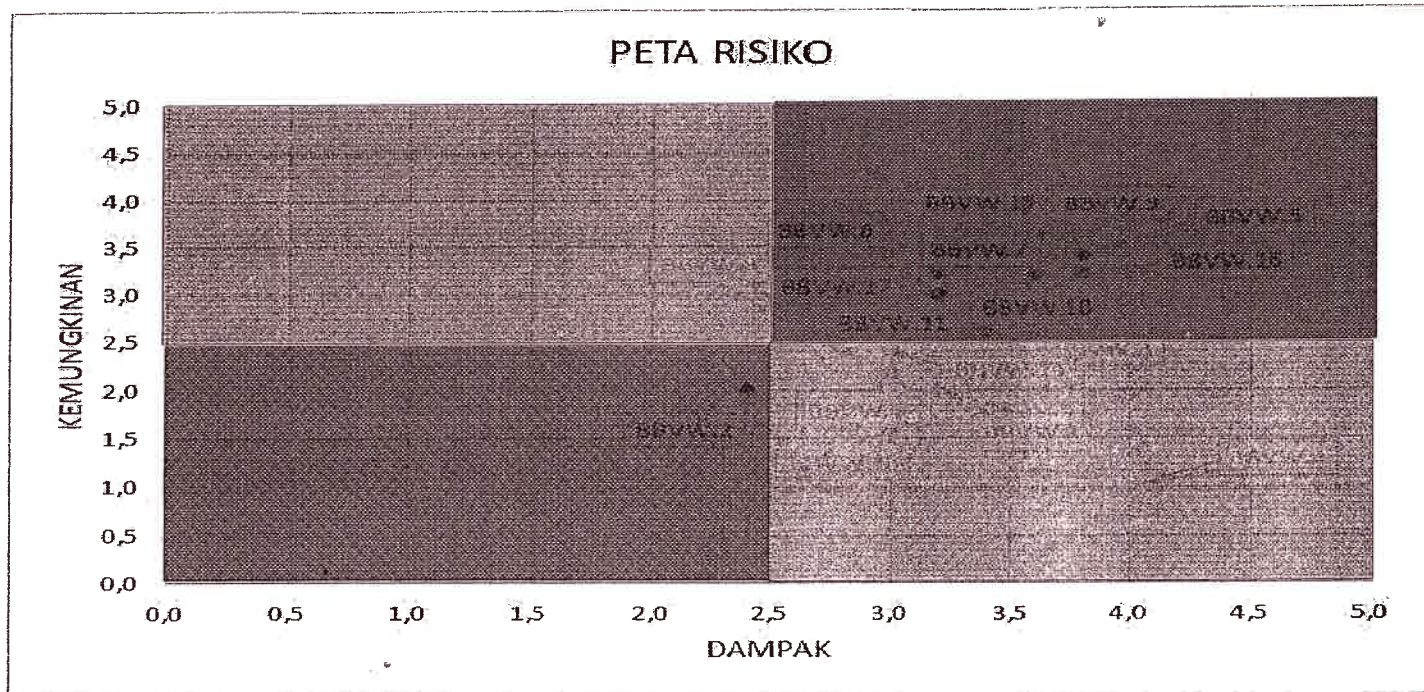
Ketua Satlak PI

drh. Indarto Sudarsono, MMT  
NIP. 19640624 199303 1 016

Wates, 11 April 2019

Mengetahui,  
Plh. Kepala Balai

drh. Indarto Sudarsono, MMT  
NIP. 19640624 199303 1 016



Wates, 11 April 2019

Ketua Satlak PI

Mengetahui,  
Kepal Balai

drh. Indarto Sudarsono, MMT  
NIP. 19640624 199303 1 016

drh. Bagoes Poermadjaja, M.Sc  
NIP. 19630820 199003 1 003

Ketua Kegiatan #BEKERJA

drh. Didik Yulianto, M.Sc  
NIP. 19770724 200604 1 001

DAFTAR AKTIFITAS PENGENDALIAN RISIKO  
KEGIATAN : Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Bidang Peternakan Tahun 2019  
BALAI BESAR VETERINER WATES

No	Proses Bisnis	Reg. Risiko	Pernyataan Risiko	Penyebab	Aktivitas Pengendalian	Ref. PP No: 60/2008	Kendali SOP	Form SOP	Action Plan (Waktu)	Penanggung Jawab	Evident
1	Perencanaan Anggaran dan Kegiatan	BBVW.1	Anggaran harga ayam yang terlalu rendah	Proses perencanaan anggaran kurang cermat	Memastikan harga ayam sesuai harga wajar	E	Memo dinas dari KPA kepada PPK untuk melakukan revisi anggaran	SOP 1	Februari 2019	Kabid Program dan Evaluasi	Memo dinas
		BBVW.2	Kelebihan anggaran pengadaan ayam	Perencanaan kegiatan yang ditetapkan Pusat belum valid (data RTM belum valid)	Memastikan jumlah anggaran sesuai dengan jumlah RTM	E	Memo dinas dari KPA kepada Kabid Program dan Evaluasi untuk memastikan jumlah RTM	SOP 2	April 2019	Kabid Program dan Evaluasi	Memo dinas
2	Pengorganisasian Kegiatan	BBVW.3	Hubungan tata kerja dan koordinasi dengan instansi terkait tidak dapat berjalan lancar dan optimal	Pendamping tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Dusun belum ditunjuk dan ditetapkan serta uraian tugas belum dicantumkan dalam SK Kepala Balai .	Memastikan SK Kepala Balai memuat Pendamping tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Dusun belum ditunjuk dan ditetapkan serta uraian tugas.	B	SK Kepala Balai tentang struktur organisasi kegiatan Bekerja	SOP 3	April 2019	Kabid Program dan Evaluasi	SK Kabalai
3	Verifikasi dan Penetapan Rumah Tangga Miskin Penerima Bantuan	BBVW.4	Penolakan oleh instansi/aparat setempat	Hasil verifikasi RTM tidak sesuai dengan harapan aparat setempat/konflik kepentingan	Memastikan tidak adanya penolakan	G	Kepala Balai melakukan koordinasi dan mediasi dengan pejabat instansi yang menolak serta atasan langsung pejabat yang menolak kegiatan bekerja	SOP 19	Juni 2019	Kepala Balai	
		BBVW.5	RTM penerima bantuan tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam juknis	Verifikasi RTM dilakukan di Kantor Kecamatan (dihadiri Kadus, Kades, TKSK/perwakilan Dinsos Tingkat Kabupaten dan Petugas Dinas yang Membidangi Fungsi Peternakan, dan verifikasi faktual di tingkat lapangan tidak seluruhnya dilakukan serta belum ditetapkan oleh Kepala BBVet Wates selaku KPA	Memastikan RTM penerima bantuan sesuai dengan kriteria	G	Berita acara hasil verifikasi yang memuat keterangan bahwa RTM telah sesuai kriteria dan ditandatangani oleh tim verifikasi,TKSK dan Camat	SOP 6	April 2019	Kabid Program dan Evaluasi	BA verifikasi
4	Penyerahan Uang Tunai Untuk Pembuatan Kandang	BBVW.6	Keterlambatan pembuatan kandang	Kesalahan penyerahan nomor rekening oleh UPKK	Memastikan no rekening UPKK aktif dan tidak terjadi kesalahan penginputan no rekening	H	surat tugas untuk mereviu no rekening UPKK	SOP 7	April 2019	Kabid Program dan Evaluasi	Kertas kerja reviu
		BBVW.7	Pemotongan uang kandang oleh UPKK	Kurangnya sosialisasi terkait pemanfaatan uang kandang	Memastikan RTM menerima bantuan uang kandang 100% (Rp.500.000,00)	H	Sosialisasi pada RTM terkait jumlah dan penggunaan uang kandang	SOP 8	Mei 2019	Kabid Program dan Evaluasi	Surat undangan, notulen, daftar hadir



No	Proses Bisnis	Reg. Risiko	Pernyataan Risiko	Penyebab	Aktivitas Pengendalian	Ref. PP No 60/2008	Kendali SOP	Form SOP	Action Plan (Waktu)	Penanggung Jawab	Evident
5	Pengadaan Ternak, Pakan dan Obat	BBVW.8	Kemahalan harga	Penyusunan HPS tidak sesuai ketentuan	Memastikan HPS disusun berdasarkan harga pasar setempat	H	surat tugas untuk melakukan survey harga	SOP 9	Mei 2019	PPK	Surat tugas, laporan hasil survey
		BBVW.9	Barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi dan volume pada kontrak	Pihak ke 3 kurang bertanggung jawab	Memastikan Barang yang diterima sesuai dengan spesifikasi dan volume pada kontrak	B	PPK membuat form checklist terhadap penerimaan barang pada saat droping untuk memastikan sesuai spesifikasi dan volume	SOP 11	April 2019	PPK	Form checklist kesesuaian spesifikasi dan volume
		BBVW.10	Ternak yang disalurkan tidak terjamin kesehatannya	Pihak ke-3 tidak melampirkan surat keterangan keswan dan bukti vaksinasi	Memastikan pihak ke-3 tidak melampirkan surat keterangan keswan dan bukti vaksinasi	G	Dalam dokumem tender (draf kontrak) menyebutkan kalusul bahwa pembayaran kontrak pengadaan ternak dapat dilakukan jika ternak telah tersalur ke RTM dengan dilengkapi dokumen pendukung berupa SKKH dan Vaksinasi	SOP 12	April 2019	PPK	draf kontrak
		BBVW.11	Ayam tidak mendapatkan pakan	Jadwal penyaluran ayam dan pembagian pakan dan obat-obatan belum diatur secara rinci	Memastikan penyaluran pakan dan obat-obatan sebelum atau bersamaan dengan ayam	H	Membuat jadwal dan lokasi penyaluran ternak, pakan, dan obat-obatan yang sepakati antara penyedia pakan, obat-obatan dan ternak	SOP 14	Mei 2019	Ketua Kegiatan Bekerja	Jadwal penyaluran pakan, obat-obatan dan ternak
		BBVW.12	Gagal tender	1. HPS terlalu rendah (tidak ada yang menawar), 2. Spesifikasi barang tidak ada dilapangan	Memastikan tidak terjadi gagal tender	E	ST Survei pasar	SOP 9	April 2019	PPK	Surat tugas, laporan hasil survey
		BBVW.13	Penyelesaian pekerjaan melebihi waktu kontrak	Pihak ke-3 kurang bertanggung jawab	Memastikan penyelesaian pekerjaan melebihi waktu kontrak	E	Membentuk Tim Pengendalian Intern kegiatan Bekerja untuk melakukan kontrol pelaksanaan pengadaan	SOP 14	Mei 2019	KPA	SK Kabalai
		BBVW.14	Pihak ke-3 wanprestasi namun jaminan pelaksanaan tidak dapat dicairkan	PPK tidak melakukan crosscheck terhadap validitas jaminan pelaksanaan pada instansi penerbit	Memastikan jaminan pelaksanaan valid dan dapat dicairkan	K	ST untuk mengecek validitas jaminan pelaksanaan	SOP 15	Juni 2019	PPK	ST dan laporan hasil perjalanan dinas
6	Pemanfaatan Bantuan Hibah	BBVW.15	Ayam mati/hilang/dipotong/dijual oleh RTM sebelum masa produksi	Pendampingan yang dilakukan oleh Satker, Dinas yang membidangi fungsi peternakan di Provinsi/Kabupaten tidak optimal	memastikan pemeliharaan dan produksi sesuai ketentuan	B	Sosialisasi teknik budidaya dan waktu produksi ternak (pendamping desa dan perwakilan RTM)	SOP 16	Mei 2019	PPK	Surat undangan, notulen, daftar hadir
7	Pengelolaan Administrasi Hibah	BBVW.16	Dokumen pendukung hibah tidak lengkap dan terlambat	Kurangnya koordinasi dengan Dinas Kabupaten setempat yang membidangi peternakan	Memastikan dokumen pendukung hibah lengkap dan tepat waktu	K	Memo Dinas Kabalai kepada PPK untuk segera menyiapkan form bersedia menerima hibah dan BAST Hibah dan segera dikirim ke Dinas Kabupaten masing-masing	SOP 17	Mei 2019	PPK	Memo dinas

No	Proses Bisnis	Reg. Risiko	Pernyataan Risiko	Penyebab	Aktivitas Pengendalian	Ref. PP No 60/2008	Kendali SOP	Form SOP	Action Plan (Waktu)	Penanggung Jawab	Evident
8	Pelaporan	BBVW,17	Laporan kurang informatif terkait permasalahan seperti kondisi ternak yang mati serta hambatan lainnya di lapangan	belum disusun alur dan format pelaporan dari tingkat desa sampai ke BBVet Wates	Memastikan Laporan informatif terkait permasalahan seperti kondisi ternak yang mati serta hambatan lainnya di lapangan	A	SOP Alur pelaporan serta form pelaporan	SOP 18	Desember 2019	Ketua Kegiatan Bekerja	Alur pelaporan dan form pelaporan

Ketua Satiak PI

drh. Indarto Sudarsono, MMT  
NIP. 19640624 199303 1 016

Wates, 12 April 2019  
Mengetahui,  
Plh. Kepala Balai

drh. Indarto Sudarsono, MMT  
NIP. 19640624 199303 1 016

Lampiran 2

(Standart Operational Procedures/SOP sub kegiatan pada Kegiatan  
BEKERJA Tahun 2019)

SOP 1: Revisi Anggaran Bekerja

**MEMO DINAS**

Nomor :

Dari : Kepala Balai Besar Veteriner Wates  
Kepada Yth : PPK  
Perihal : Revisi Anggaran Bekerja  
Tanggal : Februari 2019

---

Terkait dengan anggaran bekerja tahun 2019, diharapkan PPK dapat melakukan revisi anggaran tahun 2019 agar kegiatan dapat berjalan lancar.

Demikian saya disampaikan agar ditindaklanjuti, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kepala Balai,

Drh. Bagoes Poermadjaja, M.Sc  
NIP 19630820 199003 1 003

SOP 2: Memastikan Jumlah RTMP

**MEMO DINAS**

Nomor :

Dari : Kepala Balai Besar Veteriner Wates  
Kepada Yth : Kabid Program dan Evaluasi  
Perihal : Jumlah Rumah Tangga Miskin Pertanian (RTMP) Bekerja 2019  
Tanggal : April 2019

---

Terkait dengan kegiatan bekerja tahun 2019, diharapkan Kepala Bidang Program dan Evaluasi dapat memastikan jumlah Rumah Tangga Miskin Pertanian (RTMP) penerima bantuan kegiatan Bekerja 2019 telah sesuai dengan jumlah anggaran agar kegiatan dapat berjalan lancar.

Demikian saya disampaikan agar ditindaklanjuti, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kepala Balai,

Drh. Bagoes Poermadjaja  
NIP 19630820 199003 1 003

**SOP 3: SK KABALAI**

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI BESAR VETERINER WATES**

**NOMOR: ...../Kpts/OT.050/F5.D//2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA  
KEGIATAN BEDAH KEMISKINAN RAKYAT SEJAHTERA (BEKERJA)  
BALAI BESAR VETERINER WATES  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI BESAR VETERINER WATES**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, telah ditetapkan Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA) Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019 dengan penetapan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Permentan Nomor 43/PERMENTAN/RC.110/11/2018;
  - b. bahwa agar dalam pelaksanaan Kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA) di Balai Besar Veteriner Wates bisa berjalan sesuai kaidah teknis serta Peraturan Perundangan yang berlaku maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Balai Besar Veteriner Wates Tahun Anggaran 2019;
  - c. bahwa nama Pejabat yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA) Balai Besar Veteriner Wates Tahun Anggaran 2019.

### **SOP 3: SK KABALAI**

Mengingat

- 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3 Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Nomor 66 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4400);
- 4 Undang-Undang No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) juncto Undang-Undang No. 41 tahun 2014)
- 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127)
- 8 Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
- 9 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
- 11 Peraturan Menteri Keuangan No.111/PMK.06 /2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita

### **SOP 3: SK KABALAI**

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);

- 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 Tahun 20198 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
- 13 Peraturan Menteri Pertanian No.54/Permentan /OT.140/5/2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Veteriner;
- 14 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/RC.110/12/2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018;
- 15 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/RC.110/11/2018 tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2019 dan kemudian diganti oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2019;
- 16 Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 02968/Kpts/PK/240/F/03/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian (Bekerja) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2019.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2019 Balai Besar Veteriner Wates Nomor DIPA-018.06.2.239544/2019 Tanggal 05 Desember 2018 dan kemudian direvisi dengan SP DIPA Tahun Anggaran 2019 Revisi ke 01 Tanggal 27 Februari 2019;

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA) Balai Besar Veteriner Wates Tahun Anggaran 2019 yang nama-nama personil dan uraian tugasnya sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- Kedua : Tim Pelaksana Kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Balai Besar Veteriner Wates dalam melaksanakan tugasnya harus



### **SOP 3: SK KABALAI**

berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku;

- Ketiga : Tim Pelaksana Kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Balai Besar Veteriner Wates dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Veteriner Wates;
- Keempat : Semua biaya akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Besar Veteriner Wates Nomor DIPA-018-06.2.239544/2019 Tanggal 05 Desember 2018 Revisi ke 01 Tanggal 27 Februari 2019 Tahun Anggaran 2019;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 02 Januari 2019

**Kepala Balai,**

**Drh. Bagoes Poermadjaja, MSc.**  
NIP 196308201990031003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Jakarta;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Jakarta;
5. Kepala KPPN di Wates;
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip.

SOP 4 : Surat Tugas Melaksanakan Sosialisasi Kegiatan Bekerja

**SURAT TUGAS**

Nomor : .....

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan Kinerja di Lingkungan Balai Besar Veteriner Wates sesuai Tugas dan Fungsi BBVet Wates  
b. Bahwa dalam penyelesaian pekerjaan di BBVet wates diperlukan penugasan pegawai

Dasar : 1. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 54/Permentan/OT.140/5/2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang Organisasi dan tata Kerja BBVet Wates  
2. DIPA Satker Balai Bear Veteriner Wates Tahun 2019, No. SP DIPA :018.06.2.239544/2019, Tanggal 5 Desember 2018  
3. ....

**Kepala Balai Besar Memberika Tugas**

Kepada : 1. Nama :  
NIP :  
Pangkat :  
Jabatan :  
2 Nama :  
NIP :  
Pangkat :  
Jabatan :  
3 .....  
.....  
.....  
.....

Untuk : Mengadakan Sosialisasi Petunjuk Teknis Kegiatan #Bekerja di Kabupaten....., pada tanggal.....

Pembiayaan ditanggung oleh DIPA BBVet Wates TA 2019  
Agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan segera membuat lapoan dan disampaikan kepada atasan langsung

Yogyakarta ,.....  
Kepala balai Besar

.....  
NIP

SOP 5: Surat Undangan Sosialisasi

Nomor : .....2019  
Sifat :  
Lampiran :  
Hal : Sosialisasi Kegiatan Bekerja

Yth.

.....

Ditempat

Dalam rangka Kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (#Bekerja), Balai Veteriner Wates akan mengadakan sosialisasi yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal :  
Waktu :  
Tempat :  
Acara :

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami harapkan Saudara dapat menugaskan pejabat yang berkompeten yang menangani kegiatan untuk hadir pada acara dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala Balai

Drh. Bagoes Poermadjaja, M.Sc  
NIP 19630820 199003 1 003

Tembusan:

1.....

SOP 6: Berita Acara Verifikasi RTM

**BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI RUMAH TANGGA MISKIN PERTANIAN  
CALON PENERIMA PROGRAM BEDAH KEMISKINAN RAKYAT SEJAHTER  
(#Bekerja)**

Nomor:.....

Pada hari ini....., tanggal.....2019, yang bertanda tangan ini Tim Verifikasi #Bekerja Kementerian Pertanian RI telah melakukan verifikasi RTM di Kecamatan.....Kabupaten....., sejumlah .....RTMP telah memenuhi kriteria menerima bantuan dengan perincian sebagai berikut:

No	Desa	Jumlah RTM	Hasil Verifikasi	
			Valid	Tidak Valid
1.				
2.				
3.				

Data rincian nama dan alamat Rumah Tangga Miskin Pertanian terlampir.

Tim Verifikasi: Balai Besar Veteriner Wates, Kementerian Pertanian RI	Tanda Tangan
1.	
2.	
3.	

Tim Verifikasi: Camat, Kepala Desa, TKSK, Korcam PKH	Tanda Tangan
1.	
2.	
3.	

Demikian Berita Acara hasil verifikasi dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan.

SOP 6: Berita Acara Verifikasi RTM

Mengetahui,  
Koordinasi #Bekerja  
Balai Besar Veteriner Wates

.....  
NIP.

SOP 9 : Surat Tugas Melaksanakan Survey

**SURAT TUGAS**

Nomor : .....

**Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka peningkatan Kinerja di Lingkungan Balai Besar Veteriner Wates sesuai Tugas dan Fungsi BBVet Wates  
b. Bahwa dalam penyelesaian pekerjaan di BBVet wates diperlukan penugasan pegawai

**Dasar** : 1. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 54/Permentan/OT.140/5/2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang Organisasi dan tata Kerja BBVet Wates  
2. DIPA Satker Balai Bear Veteriner Wates Tahun 2019, No. SP DIPA :018.06.2.239544/2019, Tanggal 5 Desember 2018  
3. ....

**Kepala Balai Besar Memberika Tugas**

**Kepada** : 1. Nama :  
NIP :  
Pangkat :  
Jabatan :  
2 Nama :  
NIP :  
Pangkat :  
Jabatan :  
3 .....  
.....  
.....  
.....

**Untuk** : Mengadakan Reviu Rekening UPKK Penerima Bantuan Kegiatan Bekerja pada tanggal.....

Pembiayaan ditanggung oleh DIPA BBVet Wates TA 2019  
Agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan segera membuat lapoan dan disampaikan kepada atasan langsung

Yogyakarta ,.....  
Kepala balai Besar

.....  
NIP

SOP 12: DAFTAR TITIK BAGI

DAFTAR TITIK BAGI  
KEGIATAN BEKERJA TAHUN 2019  
KECAMATAN.....KABUPATEN.....

NO	DESA	DUSUN	TITIK BAGI	JUMLAH RTM	JUMLAH PAKAN I (3 ZAK)	TGL DISTRIBUSI	JUMLAH AYAM (@50	TGL DISTRIBUSI
1		1					0	
		2					0	
		3					0	
		4					0	
<b>TOTAL</b>				<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
2		1					0	
		2					0	
		3					0	
		4					0	
<b>TOTAL</b>				<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
3		1					0	
		2					0	
		3					0	
		4					0	
		5					0	
<b>TOTAL</b>				<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	

**SOP 14: SK KABALAI SPI BEKERJA**

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI BESAR VETERINER WATES**

**NOMOR: ...../Kpts/OT.050/F5.D//2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI INTERN  
KEGIATAN BEDAH KEMISKINAN RAKYAT SEJAHTERA (BEKERJA)  
BALAI BESAR VETERINER WATES  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI BESAR VETERINER WATES**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, telah ditetapkan Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA) Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019 dengan penetapan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Permentan Nomor 43/PERMENTAN/RC.110/11/2018;
  - b. bahwa agar dalam pelaksanaan Kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA) di Balai Besar Veteriner Wates bisa berjalan sesuai kaidah teknis serta Peraturan Perundangan yang berlaku maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Balai Besar Veteriner Wates Tahun Anggaran 2019;
  - c. bahwa nama Pejabat yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA) Balai Besar Veteriner Wates Tahun Anggaran 2019.



## **SOP 14: SK KABALAI SPI BEKERJA**

- Mengingat
- 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
  - 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 3 Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Nomor 66 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4400);
  - 4 Undang-Undang No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) juncto Undang-Undang No. 41 tahun 2014)
  - 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
  - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
  - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127)
  - 8 Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
  - 9 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
  - 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
  - 11 Peraturan Menteri Keuangan No.111/PMK.06 /2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita

## **SOP 14: SK KABALAI SPI BEKERJA**

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);

- 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 Tahun 20198 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
- 13 Peraturan Menteri Pertanian No.54/Permentan /OT.140/5/2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Veteriner;
- 14 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/RC.110/12/2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018;
- 15 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/RC.110/11/2018 tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2019 dan kemudian diganti oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2019;
- 16 Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 02968/Kpts/PK/240/F/03/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian (Bekerja) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2019.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2019 Balai Besar Veteriner Wates Nomor DIPA-018.06.2.239544/2019 Tanggal 05 Desember 2018 dan kemudian direvisi dengan SP DIPA Tahun Anggaran 2019 Revisi ke 01 Tanggal 27 Februari 2019;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Tim Pengendali Intern Kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA) Balai Besar Veteriner Wates Tahun Anggaran 2019 yang nama-nama personil dan uraian tugasnya sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;  
Kedua : Tim Pengendali Intern Kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Balai Besar Veteriner Wates dalam melaksanakan tugasnya harus

## **SOP 14: SK KABALAI SPI BEKERJA**

berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku;

- Ketiga : Tim Pengendali Intern Kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Balai Besar Veteriner Wates dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Veteriner Wates;
- Keempat : Semua biaya akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Besar Veteriner Wates Nomor DIPA-018-06.2.239544/2019 Tanggal 05 Desember 2018 Revisi ke 01 Tanggal 27 Februari 2019 Tahun Anggaran 2019;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : .....

**Kepala Balai,**

**Drh. Bagoes Poermadjaja, MSc.**  
NIP 196308201990031003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Jakarta;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Jakarta;
5. Kepala KPPN di Wates;
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip.

**SURAT TUGAS**

Nomor : .....

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka peningkatan Kinerja di Lingkungan Balai Besar Veteriner Wates sesuai Tugas dan Fungsi BBVet Wates  
b. Bahwa dalam penyelesaian pekerjaan di BBVet wates diperlukan penugasan pegawai

- Dasar** : 1. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 54/Permentan/OT.140/5/2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang Organisasi dan tata Kerja BBVet Wates  
2. DIPA Satker Balai Bear Veteriner Wates Tahun 2019, No. SP DIPA :018.06.2.239544/2019, Tanggal 5 Desember 2018  
3. ....

**Kepala Balai Besar Memberika Tugas**

- Kepada** : 1. Nama :  
NIP :  
Pangkat :  
Jabatan :  
2. Nama :  
NIP :  
Pangkat :  
Jabatan :  
3. ....  
.....  
.....  
.....

**Untuk** : Mengecek validitas jaminan pelaksanaan dari pihakke-3 pada Kegiatan Bekerja tanggal.....

Pembiayaan ditanggung oleh DIPA BBVet Wates TA 2019  
Agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan segera membuat lapoan dan disampaikan kepada atasan langsung

Yogyakarta ,.....  
Kepala balai Besar

.....  
NIP

**MEMO DINAS**

Nomor :

Dari : Kepala Balai Besar Veteriner Wates  
Kepada Yth : PPK  
Perihal : Revisi Anggaran Bekerja  
Tanggal : Februari 2019

---

Terkait dengan kegiatan bekerja tahun 2019, diharapkan PPK segera menyiapkan form Kesiadaan Menerima Hibah dan BAST Hibah dan segera dikirim ke Dinas Kabupaten masing-masing.

Demikian saya disampaikan agar ditindaklanjuti, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kepala Balai,

Drh. Bagoes Poermadjaja  
NIP 19630820 199003 1 003

Outline Laporan Akhir

- I. Pendahuluan
  - 1.1. Latar Belakang
  - 1.2. Tujuan
  - 1.3. Strategi Pelaksanaan
  
- II. Pelaksanaan Kegiatan
  - 2.1. Tim Pelaksanan
  - 2.2. Alokasi Anggaran
  - 2.3. Lokasi Kegiatan
  - 2.4. Jadwal Pelaksanaan
  - 2.5. Verifikasi
    - a. Pelaksana/Tim Verifikasi
    - b. Hasil Verifikasi
  - 2.6. Pengadaan
  
- III. Realisasi
  - 3.1. Fisik
    - a. Realisasi Total
    - b. Realisasi per Kabupaten/Kecamatan/Desa
  - 3.2. Keuangan
  - 3.3. Perkembangan Populasi dan Kematian Ternak
  
- IV. Permasalahan dan Tindak Lanjut
  - 4.1. Verifikasi
  - 4.2. Distribusi
  - 4.3. Paska Distribusi
  
- V. Kesimpulan dan Saran
  - 4.1. Kesimpulan
  - 4.2. Saran-saran
  
- VI. Penutup

